

BAB V

ANALISIS HASIL ORIENTASI PENDIDIKAN PESANTREN MUHAMMADIYAH DI SUMATERA UTARA

Tiga hal yang menjadi fokus utama dalam studi ini yaitu sistem pendidikan, orientasi pendidikan, dan implementasi masing-masing orientasi tersebut di dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Selain itu, beberapa pembahasan lainnya seperti aspek kesejarahan dua pendidikan pesantren ini telah disinggung pada bab sebelumnya.

Sebelum menguraikan fokus utama penelitian ini sebagaimana disebutkan, diuraikan kembali pandangan-pandangan atau temuan-temuan terkait dengan kelembagaan pendidikan pesantren. Ulasan ini penting, paling tidak untuk melihat corak pesantren Muhammadiyah dengan temuan-temuan tentang pesantren sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Sebagaimana dikemukakan Zamakhsyary Dzofier bahwa elemen terbentuknya pesantren adalah pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kyai. Selain menguraikan elemen-elemen dasar terbentuknya pesantren, Dzofier juga mengelompokkan pesantren kepada *salafiyah*, *khalafiyah*, bahkan dalam temuan lain dikenal adanya *pesantren kombinasi*. Di sisi lain, meskipun pada awalnya unsur-unsurnya sederhana, akan tetapi pesantren mengalami perkembangan yang sangat variatif dan melakukan penyesuaian-penyesuaian.

Perkembangan ini terlihat dari pengelompokan yang dilakukan oleh Departemen Agama tahun 1979 yang mengungkapkan bentuk pesantren dari aspek sarana dan prasarana ke dalam lima tipologi. Kelima unsur yang digagas Soejoko Prasodjo persis sama dengan temuan yang ditemukan oleh Dzofier ini yang mengelompokkan pesantren berdasarkan dimensi sarana fisik ke dalam lima kelompok. Pengelompokan pesantren berkembang tidak saja dari aspek fisik akan tetapi pengelompokan berdasarkan kurikulum juga muncul sebagaimana temuan yang dikembangkan oleh Haidar Daulay. Dalam temuannya Haidar mengelompokkan pesantren berdasarkan kurikulum kepada lima pola pesantren sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Bahkan temuan lain yang menemukan ragam orientasi pesantren dipengaruhi oleh pimpinan dan para pengelola. Ragam pesantren salafi mengkonstruksi pendidikannya ke arah pelestarian dan kontinuitas kultur salafi, ragam pesantren modern mengorientasikan

pendidikannya terhadap pelestarian dan pembaharuan pendidikan pesantren. Sementara beberapa pesantren yang memiliki akar dengan pesantren modern mengkonstruksi orientasi pendidikannya terhadap penyiapan kader Islam. Kategori pesantren berdasarkan spesialisasi ilmu yang diajarkan juga dimunculkan oleh Maunah, yang membagi pesantren kepada pesantren alat, pesantren tasawuf, dan pesantren fiqh.

Berdasarkan pandangan yang dibangun para peneliti dengan berbagai ragam temuan tentang pesantren, memunculkan beberapa perbedaan dengan pondok pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Jika temuan Dzofier yang digunakan untuk memetakan pesantren Muhammadiyah di Sumatera utara berdasarkan lima elemen dasar pesantren, tampaknya tidak tepat untuk dialamatkan kepada dua pesantren ini.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran kitab-kitab klasik sebagai ciri khas pesantren yang tujuan utamanya adalah mendidik calon-calon ulama ternyata tidak diajarkan di pondok pesantren KHA. Dahlan Sipirok. Meskipun Muhammadiyah sendiri telah merumuskan pendepinisian kitab-kitab klasik, yaitu pembelajaran kitab berbahasa Arab karya ulama klasik dan kontemporer yang sejalan dengan faham Muhammadiyah. Kenyataan menunjukkan tidak saja kitab-kitab karya ulama klasik bahkan kitab-kitab karya ulama kontemporer juga bukan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di pesantren KHA. Dahlan. Konsekuensinya adalah metode pengajaran yang menggunakan metode *sorogan*, *bandongan*, atau *wetonan* dalam pembelajaran kitab kuning sebagaimana ditemukan di pesantren-pesantren lain tidak ditemukan di dua pesantren ini. Secara historis, pada tahun-tahun pertama pesantren ini pernah menggunakan kitab-kitab kuning karya ulama kontemporer. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya dan pemberlakuan kurikulum SKB Tiga Menteri maka pembelajaran kitab-kitab tersebut secara perlahan hilang dari pesantren ini. Justru hal yang berbeda dengan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu yang meskipun tidak mengajarkan kitab-kitab kuning karya ulama klasik akan tetapi beberapa kitab yang bernuansa kontemporer masih diajarkan pada jam formal di kelas dan informal di masjid seperti kitab *fiqh al-sunnah*, *tafsir Ibn Katsir* dan *akhlaq lilbanin* dan lain-lain.

Selanjutnya adalah berkenaan dengan posisi kyai sebagai elemen esensial yang dipandang sebagai figur sentral dalam kepemimpinan sebuah pesantren. Bahkan orientasi pesantren sangat dipengaruhi oleh keilmuan kyainya. Kondisi sebaliknya adalah pondok pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara tidak mengenal konsep ke-kyai-an secara melembaga. Sehingga kepemimpinan dan otoritas kyai tidak dikenal di lingkungan pesantren ini. Kenyataan memang menunjukkan bahwa dalam Muhammadiyah tidak terdapat tradisi

yang kuat untuk menyebut pimpinan atau kadernya dengan sebutan kyai. Demikian pun bukan berarti Muhammadiyah tidak memiliki tradisi keulamaan akan tetapi tidak berposisi atau berkedudukan sebagai kelompok elit dan otoriter melainkan sebagai bagian yang menyatu dengan umat. Akhirnya sikap seperti ini menjadi acuan di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah khususnya pesantren. Dalam kaitan itu para santri di pesantren Muhammadiyah Sumatera utara hanya memanggil “ustad” kepada para guru dan kepada orang-orang yang dituakan. Hampir tidak ditemukan panggilan kyai, walaupun ada hanya sekedar panggilan kepada seseorang pimpinan atau guru yang memiliki sifat keulamaan. Panggilan ini merupakan penghargaan biasa yang tidak melekat dan melembaga sebagaimana kultur di pesantren-pesantren NU. Sehingga corak keilmuan pun di pesantren ini dikonstruksi secara bersama oleh para tenaga pendidik dengan pimpinan tanpa dominasi keilmuan personal. Dalam kaitan itu juga bahwa tidak ada perbedaan antara pimpinan dan guru kecuali pada jabatan formal, karena pesantren Muhammadiyah mengenal pola kepemimpinan kolektif kolegiel. Semua tenaga pendidik dipanggil dengan “Ustad”. Kyai/ Ustad adalah seorang pendidik yang dipandang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional, plus memahami ideologi Muhammadiyah. Ustad merupakan panggilan populer di dua pesantren Muhammadiyah ini kepada pimpinan dan kepada para guru.

Hal lainnya yang membedakan dua pesantren ini dengan pesantren lain adalah terkait dengan hubungan kultural antara santri dengan kyai. Tradisi yang berlaku bahwa hubungan timbal balik di pesantren pada umumnya antara santri dengan kyai atau ustad adalah hubungan yang senantiasa dilindungi. Sikap timbal balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan secara terus menerus. Sikap ini juga menimbulkan perasaan tanggung jawab di pihak kyai dan sebaliknya di pihak santri tumbuh perasaan pengabdian kepada kyainya. Tradisi seperti ini tidak ditemukan di lingkungan pesantren Muhammadiyah di Sumatera utara. Hubungan ustad dan santri berjalan secara formal. Hubungan formal ini kemungkinan sekali dipengaruhi ideologi organisasi yang menaungi pesantren ini yaitu penekanan terhadap pemurnian ajaran yang mengakibatkan kecenderungan gaya hidup praktis yang mengabaikan simbol-simbol. Kemungkinan juga disebabkan kecakapan berorganisasi yang tentu saja dapat menjurus kepada hubungan formal yang melahirkan pola individualisme dalam penyelenggaraan pesantrennya.

Di sisi lainnya ditemukan perbedaan terkait dengan tradisi pesantren pada umumnya yaitu menyangkut santri. Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara tidak mengenal kelompok santri *mukim*, yaitu murid-murid dari tempat jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Selain itu pesantren Muhammadiyah juga tidak mengenal konsep santri *kalong* yaitu

santri yang bolak-balik datang ke pesantren setiap hari. Bagi pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara semua santri menetap di asrama yang sudah disiapkan oleh pesantren. Budaya keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, dan kebebasan yang dikenal dalam kultur pesantren dengan “*asasul khamsah*” pada praktiknya tidak sekental sebagaimana pesantren-pesantren pada umumnya.

Sementara elemen dasar lainnya yaitu masjid yang dipandang sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren. Secara tradisional pandangan seperti ini tidak berbeda dengan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Masjid merupakan pusat kegiatan ibadah, pengembangan peradaban, dan kebudayaan Islam. Karena itu di dua pesantren ini masjid digunakan tidak saja sebagai tempat ibadah, akan tetapi berfungsi sebagai tempat latihan keterampilan fisik seperti pencak silat, lomba pidato, dan perlombaan lainnya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari elemen pesantren ditemukan beberapa perbedaan antara pondok pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara dengan pesantren pada umumnya. Meskipun sesungguhnya Muhammadiyah sendiri telah menetapkan unsur pesantren persis seperti temuan Dzofier yang meliputi kyai, santri, pembelajaran kitab kuning, masjid, dan asrama. Akan tetapi pada tataran operasional elemen pesantren ini tidak sepenuhnya dimaknai sebagaimana di pesantren-pesantren lain. Perbedaan ini sekaligus memberikan pandangan tentang corak atau ciri pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.

Karena itu, jika elemen pesantren sebagaimana disebut digunakan untuk melihat dua pesantren ini tentu saja tidak tepat. Meskipun unsur dan elemen pesantren di lingkungan ormas ini persis sama dengan pesantren lainnya. Namun ada perbedaan pada pemaknaan dan penilaian terhadap beberapa elemen pesantren seperti kyai dan pembelajaran kitab klasik. Kendatipun demikian, nama yang melekat pada dua pesantren ini tetap dimaknai sebagai pesantren, yaitu pesantren Muhammadiyah yang bercita rasa Muhammadiyah dengan sejumlah kurikulum dan kultur yang menguatkan idiologi ormas ini.

Sesuai dengan rumusan penelitian ini bahwa ada tiga orientasi pendidikan yang ditemukan di dua pesantren ini. Orientasi dimaksudkan adalah kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik memiliki orientasi keulamaan, kemodernan, dan praksis sosial. Ketiga orientasi ini ditemukan di dalam program pendidikan intrakurikuler, ko-kurikuler, *hidden* kurikulum dan ekstrakurikuler. Dengan harapan tiga orientasi ini mampu untuk mempersiapkan lahirnya bibit ulama dari dua pesantren ini.

Pengembangan aspek orientasi keulamaan langkah yang dilakukan kedua pesantren ini adalah pembelajaran ilmu alat seperti pembelajaran ilmu Bahasa Arab yang meliputi nahwu (sintaksis), sharf (morfologi), dan Balaghah (sastra). Pembelajaran ilmu alat ini dimungkinkan

sampai pada kecakapan berkomunikasi. Selain pemberian ilmu dasar kebahasaan, dua pondok pesantren ini juga membekali santri dengan pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan seperti usul fiqh, fiqh, tafsir, hadis. Pembelajaran materi ini tentu saja tidak sampai pada standar seorang mujtahid yang mampu berijtihad dan memahami metodologi istinbat hukum.

Selain itu, dua pesantren ini melakukan langkah pembinaan yang meliputi: a) aspek akidah yaitu membina santri dengan aqidah Islamiyah yang benar, bebas dari gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. b) aspek ubudiyah, yaitu membina santri agar memiliki kekuatan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul. Aspek ini bertujuan untuk membangun ketaqwaan, keimanan, akhlaq, dan amal shaleh. Aspek ini dibuktikan dengan kontinuitas pelaksanaan shalat berjamaah, qira'ah Alquran, anjuran pelaksanaan puasa sunat senin dan kamis. Langkah ini bertujuan untuk membangun ketaqwaan, keimanan, akhlaq, dan amal shaleh. c) aspek akhlak, yaitu pembinaan agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai akhlak mulia. instrument yang digunakan dua pesantren ini adalah tata tertib tentang kehidupan di asrama, kelas, masjid, dan di luar pesantren. d) aspek mu'amalah duniawiyah membina santri agar mampu memaknai dan melaksanakan kehidupan mu'amalah sesuai dengan ajaran Islam. Termasuk dalam lingkup ini adalah pembinaan kemsyarakatan.

Keempat aspek pembinaan ini ditemukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan yang paling menonjol ditemukan pada hidden kurikulum. Hal ini dilakukan agar santri memiliki sikap ikhsan, ikhlas, kejujuran, bertanggungjawab, dan hidup disiplin.

Pada sisi lainnya, pengembangan kemodernan ternyata tidak saja pada aspek pembelajaran ilmu-ilmu umum, modernisasi pembelajaran, dan penggunaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dalam berkomunikasi. Akan tetapi pengembangan kemodernan pada aspek pemikiran juga ditemukan dalam proses pembelajaran di dua pesantren ini. Hal ini terlihat dari pengembangan kultur akademik dan etos belajar merupakan kenyataan yang ditemukan seperti pelaksanaan diskusi-diskusi, ajang perlombaan, olimpiade, dan forum debat. Bahkan ditemukan upaya-upaya untuk menghasilkan karya pemikiran baik dalam bentuk makalah mini, klipng, serta artikel sederhana, dan pengungkapan puisi yang ditempel pada majalah dinding.

Sementara pengembangan aspek praksis sosial yaitu pengembangan peran kemsyarakatan merupakan sisi yang ditemukan dalam muatan pembelajaran. Namun orientasi ini, belum optimal dilakukan. Meskipun pada Pondok Pesantren Kwala Madu orientasi ini kurang mendapat perhatian.

Beranjak dari uraian di atas, bahwa poin yang dapat ditarik adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa dua pesantren ini telah melakukan langkah-langkah penguatan tiga

orientasi tersebut dalam penyelenggaraan pendidikannya. Setidak-tidaknya ilmu-ilmu dasar untuk mengantarkan para santrinya mendekati tolak ukur ulama sebagaimana hasil Seminar dan simposium yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1985 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), yaitu, kekuatan aqidah, ketaatan beribadah dengan benar, pelatihan dalam kedermawanan, mempunyai akhlak al-karimah, pembelajaran bahasa dan makna Alquran dan hadis, pembelajaran ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama, dan pembelajaran ke arah pembentukan tata pikir yang rasional. Hanya saja poin terakhir ini kurang mendapat perhatian. Pelajaran *Mantiq* (logika) yang sejatinya diajarkan akan tetapi pada kasus Pondok Pesantren Kwala Madu sejak berdiri tidak pernah mengajarkan materi ini sedangkan pada Pondok Pesantren KHA. Dahlan Sapirok belakangan ini mata pelajaran tersebut dihilangkan disebabkan tidak tersedianya guru. Karena itu tolak ukur dimaksud tentu saja tidak sampai pada tingkat yang dikonsepsikan oleh hasil Mukhtamar Muhammadiyah Malang yang kemungkinan dapat dicapai oleh kader ulama tingkat akademik.

Namun kenyataan menunjukkan implementasi tiga orientasi tersebut dalam pelaksanaan pendidikan belum optimal dilakukan sebagaimana tertuang di dalam program pendidikan. Kenyataan lainnya juga memperlihatkan tiga orientasi ini belum menggambarkan keterpaduan antara satu orientasi dengan orientasi lainnya sehingga pada tataran operasional kurang implementatif. Ketidak optimalan pelaksanaan ketiga orientasi ini berdasarkan pada temuan pokok yaitu, sistem pendidikan yang dijalankan belum sinergis dengan cita-cita penyiapan kader ulama. Secara kelembagaan kepesantrenan bahwa dua pesantren ini memiliki tujuan penyiapan calon kader ulama tetapi yang dilaksanakan adalah tujuan madrasah. Sebagai pesantren yang menyelenggarakan sistem madrasah, kedua pesantren ini menggunakan Kurikulum SKB Tiga Menteri dalam arti luas. Praktek dilapangan menunjukkan kuatnya dominasi kurikulum pemerintah ini dibanding dengan kurikulum kepondokan. Penciutan kurikulum kepondokan dengan alasan mengakomodir kurikulum SKB Tiga Menteri merupakan bukti yang dapat dikemukakan. Kenyataan lainnya adalah kecenderungan pendidikan di kalangan para santri bahwa minat studi ilmu-ilmu umum pada dua pondok pesantren ini sedemikian kuat dibaringi dengan prestasi mereka yang membanggakan untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kuatnya dominasi sistem kemadrasahan ini berimplikasi terhadap program kepesantrenan sering terabaikan. Program pendidikan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler bersifat *government oriented*. Sementara sifat dan bentuk program kepesantrenan muncul dalam bentuk tidak terstruktur, tidak berkelanjutan, serta lebih banyak bersifat insidentil. Pengelolaan pembagian jam/beban kerja antara kepesantrenan dan kemadrasahan tidak profesional. Pengelolaan kegiatan kepesantrenan dikerjakan sekedarnya,

tidak terkontrol dan tidak terstruktur secara baik. Pada tataran operasional kegiatan-kegiatan kepondokan hanya sekedar kegiatan yang tidak terkait sama sekali dengan pembentukan keulamaan. Hubungan antara kemadrasahan dengan kepondokan digambarkan sebagai hubungan yang seolah “menyatu tapi terpisah”. Nuansa penganaktirian terhadap program kegiatan kepondokan merupakan gambaran yang nyata dalam proses pembelajaran di pesantren ini.

Aspek lain yang dikemukakan adalah menyangkut kualifikasi tenaga pendidik yang masih mengandalkan kualifikasi minimal sehingga target pembelajaran tidak optimal. Sehingga beberapa mata pelajaran penting tidak diajarkan karena tenaga pendidik yang belum tersedia. Pendidik dalam pesantren Muhammadiyah disebut *ustad* yaitu orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, professional, dan idiologi Muhammadiyah. Jika depenisi ini yang dijadikan tolak ukur melihat kualifikasi tenaga pendidik pada dua pesantren ini ternyata belum sepenuhnya terpenuhi. Kelayakan tenaga pendidik sebagai ujung tombak pembelajaran tidak linier dengan tujuan pendidikan pesantren Muhammadiyah. Kondisi ini terjadi disebabkan tidak adanya prosedur seleksi atau sistem rekrutmen tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan pendidikan pesantren. Sistem rekrutmen tenaga pendidik pada dua pesantren ini baru sekedar berlandaskan pada kebutuhan kemadrasahan dengan bidang-bidang yang diajarkan. Sementara pemenuhan tenaga pendidik pada bidang kepesantrenan masih terabaikan.

Sebagai lembaga pendidikan perkaderan sejatinya dua pesantren ini mampu mengupayakan ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ketentuan di atas. Secara idiologis hal ini akan melahirkan loyalis ganda sehingga berada di rumah Muhammadiyah tetapi hati dan pikirannya berada di luar. Pada kasus Pondok Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu meskipun sedikit berbeda dalam merekrut tenaga pendidik akan tetapi data menunjukkan bahwa mayoritas tenaga pendidik bukan dari kalangan dan dari lulusan sekolah Muhammadiyah. Bahkan gambaran di lapangan menunjukkan penampilan kesaharian para tenaga pendidiknya secara kultural berbeda dengan apa yang dipahami dan dipraktekkan selama ini. Sementara itu Pondok Pesantren KHA. Dahlan pada waktu yang cukup lama sekitar tahun 1981 sampai tahun 1993 sebahagian besar tenaga pendidik berasal dari alumni dari pesantren non Muhammadiyah dan bukan warga Muhammadiyah dan bukan pula hasil didikan sekolah Muhammadiyah. Dalam beberapa kasus hal ini masih berlangsung pada Pondok Pesantren KHA. Dahlan Sipirok. Tentu hal ini bertentangan secara idiologis karena sangat terkait dengan wibawah dan otoritas.

Idealnya dua pesantren ini mengintegrasikan sistem kemadrasahan dan kepesantrenan modern, plus penguatan muatan kekaderan ulama menjadi sebuah sistem yang padu. Setiap sistem pendidikan menuju ke arah penguatan penyiapan calon kader ulama. Karena itu, dua pesantren ini masih terkonsentrasi pada sistem kemadrasahan dengan ciri khasnya pembelajaran kurikulum SKB Tiga Menteri dengan seperangkat ketentuan-ketentuan yang melingkupinya.

Kuatnya dominasi kemadrasahan di dua pesantren ini bukan tanpa alasan. Hal ini terkait erat dengan sejarah semangat modernisasi pendidikan yang diusung oleh Muhammadiyah sejak lama. Karena sistem madrasah merupakan bentuk modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Sehingga kecenderungan penyelenggaraan dua pesantren ini dengan sistem madrasah adalah sesuatu yang dapat diterima dan lumrah. Ketika pemerintah melakukan kebijakan pembaharuan terhadap sekolah-sekolah Islam (pesantren) dalam bentuk madrasah maka Muhammadiyah lebih nyaman dengan sistem ini karena sesuai dengan semangat pembaharuannya. Karena itu, pertumbuhan pesantren Muhammadiyah diawali dengan bentuk madrasah yang kemudian dipesantrenkan. Pesantren yang didirikan adalah pesantren yang tidak mengacu kepada pesantren klasik dengan segala tradisi yang melingkupinya tanpa pembaharuan ke arah yang lebih sesuai dengan semangat dan dinamika perkembangan zaman termasuk dalam kajian kitab-kitab. Kondisi ini berbeda dengan pesantren yang dikelola kalangan Nahdhatul Ulama (NU), meskipun tetap mengikuti sistem madrasah, akan tetapi secara kultural masih tetap mempertahankan tradisi kepesantrenan. Akan tetapi model pesantren Muhammadiyah ini tetap memiliki plus minus dalam mempersiapkan peserta didik sesuai dengan visi dan tujuannya. Plusnya terletak pada pembelajaran ilmu-ilmu modern sebagai tuntutan zaman namun minusnya adalah lemah dalam pemahaman ilmu-ilmu klasik atau warisan Islam.

Untuk itu ada kesulitan meletakkan tipologi dua pesantren ini, tapi yang pasti adalah bahwa sejarah awal pertumbuhan pesantren Muhammadiyah tidak terkecuali kedua pesantren ini beranjak dari madrasah. Hal ini yang membedakannya dengan pesantren pada umumnya yang beranjak dari pesantren berpola madrasah sehingga disebut “madrasah berbasis pesantren”. Dalam ketentuan Muhammadiyah jenis pesantren ini disebut dengan “pesantren integral” yaitu pesantren berbasis madrasah. Dua pesantren ini tidak berbeda dengan *Madrasah Boarding School* (MBS) sebagaimana ditemukan di beberapa daerah. Kenyataan menunjukkan tidak sedikit pesantren Muhammadiyah yang diberi nama dengan *Madrasah Boarding School* (MBS). Namun secara formal dua pesantren ini dapat digolongkan kepada tipe pesantren *khalafi* sebagaimana temuan Z. Dhofier, yaitu pesantren modern. Jika pengelompokan terhadap

dua pesantren Muhammadiyah ini dari sudut pandang kurikulum meminjam pola yang ditemukan Haidar Putra Daulay, tampaknya dua pesantren ini masuk pada pola ketiga yaitu pesantren yang telah dilengkapi dengan mata pelajaran umum, dan ditambah pula dengan memberikan aneka macam pendidikan lainnya, seperti keterampilan, kepramukaan, bela diri, olahraga, kesenian, dan pendidikan berorganisasi, dan sebagian telah melaksanakan program pengembangan kemasyarakatan.

Meskipun pengelompokan ini tidak sepenuhnya tepat dialamatkan kepada dua pesantren ini. Karena pesantren pola tiga sebagaimana temuan Haidar Daulay mengandung unsur adanya upaya untuk menyeimbangkan antara ilmu agama ilmu sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu kealaman. Pada kasus Pondok pesantren KHA. Dahlan tidak ditemukan adanya upaya menyeimbangkan ilmu-ilmu tersebut secara konsisten, tetapi justru yang ditemukan adalah penciptaan ilmu-ilmu keagamaan sebagai akibat dari kuatnya invansi pembelajaran ilmu-ilmu praktis (umum). Kuatnya dominasi sistem kemadrasahan sehingga beberapa pelajaran penting di pesantren tampaknya tidak mendapat perhatian seperti pelajaran Mantiq, Balaghah, syair-syair Arab (mahfudzat), Tafsir Ilmu Tafsir, dan Hadis Ilmu Hadis. Sedangkan pada kasus Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kuala Madu meskipun tidak menyelenggarakan jurusan keagamaan akan tetapi dari isi pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan justru lebih kaya dibanding dengan Pondok Pesantren KHA. Dahlan Sapiro. Dalam konteks sekarang, kondisi ini dapat dipahami melihat perkembangan pesantren ini yang jauh tertinggal dari Pesantren Kwala Madu termasuk dilihat dari perkembangan siswa.

Meminjam pandangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang orientasi pendidikan pesantren dijadikan tolak ukur untuk melihat dua pesantren ini, maka konstruk orientasi pesantren ini tidak ditemukan. Konstruk orientasi pendidikan terhadap pelestarian dan pembaharuan pendidikan tidak tepat dialamatkan kepada dua pesantren ini, konstruk pendidikan terhadap penyiapan kader Islam juga tidak tepat, bahkan konstruk terhadap pelestarian dan kontinuitas kultur dan faham Muhammadiyah juga tidak tepat. Bahkan jika dilihat dari spesialisasi ilmu yang diajarkan bahwa dua pesantren ini belum memiliki spesifikasi sebagaimana yang diharapkan Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan kader ulama. Hanya saja dua pesantren ini memiliki sedikit ciri khas yaitu penambahan kurikulum al-Islam Kemuhammadiyah dan ketarjahan, sebagai pertanda bahwa pesantren ini berada di bawah naungan ormas Muhammadiyah. Selain itu, pemetaan tiga kelompok pesantren berdasarkan spesialisasi ilmu yang diajarkan yaitu pesantren alat, pesantren tasawuf, pesantren fiqh maka dua pesantren ini sulit diposisikan pada pengelompokan ini. Hal ini disebabkan ketiadaan spesialisasi atau spesifikasi pada dua

pesantren Muhammadiyah ini. Hal ini juga dibuktikan dengan tiga orientasi pendidikan dua pesantren ini yang menunjukkan keragaman spesialisasi lulusan yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, jika lulusan yang dimaksudkan adalah lulusan yang memahami fiqh (hukum Islam) *an sich* atau hadis saja tentu saja tidak diharapkan lahir dari dua pesantren ini. Ketiga orientasi tersebut menggambarkan lulusan yang akan dilahirkan yaitu lulusan yang menjalankan dan memahami dasar-dasar ilmu-ilmu ketuhanan dalam kehidupannya, serta memiliki ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan dan mampu membaur di tengah-tengah masyarakat.

Selain alasan yang dikemukakan di atas, persoalan standar penyelenggaraan pendidikan tentunya turut mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan orientasi pada dua pesantren ini. Satu hal yang patut diungkapkan adalah bahwa sampai hari ini Muhammadiyah sendiri belum memiliki “standar penyelenggaraan pesantren” sebagai bahan acuan baku. Peraturan yang ada selama ini baru sekedar mengatur persoalan teknis, belum mengatur persoalan substansial seperti muatan isi pesantren. Penyelenggaraan dua pesantren ini dalam banyak hal masih menggunakan pedoman tentang kemadrasahan sedangkan hal-hal yang terkait dengan standar isi, standar kelulusan, standar pendidik, dan standar pembinaan masih berpedoman kepada hasil rapat internal para guru dan pimpinan.

Tidak adanya standar penyelenggaraan menjadikan orientasi dan tujuan yang hendak dicapai tidak maksimal bahkan proses pembelajaran pesantren berjalan tanpa arah. Bahkan satu sistem dengan sistem lainnya tidak menggambarkan sistem yang kordinatif. Sehingga dua pesantren ini berjalan sesuai dengan selera para guru dan pimpinan serta memiliki kecenderungan keragaman antara satu pesantren dengan lainnya. Hal ini terlihat dari perbedaan sistem yang dijalankan masing-masing pesantren ini.

Melihat lebih jauh, terkait dengan dinamika pembelajaran di dua pesantren ini menggambarkan nuansa rutinitas dan monoton. Dengan kata lain semangat atau spirit pembaharuan Muhammadiyah tidak berimplikasi dan terimplementasi dalam penyelenggaraan pendidikan Pesantren Muhammadiyah. Idealnya gerak dan dinamika proses pembelajaran menggambarkan *progresifitas* dalam praktek di lapangan para pengelola pendidikan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.

Faktor eksternal juga turut mempengaruhi gambaran di atas yaitu pemberlakuan kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru. Bagi Pondok Pesantren KHA. Dahlan pemberlakuan sertifikasi terhadap guru-gurunya pada satu sisi menguntungkan karena akan meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi pada sisi lain sangat merugikan karena guru-guru bersertifikasi hanya melaksanakan tugasnya untuk memenuhi beban mengajar sebagai guru Madrasah sehingga tugas-tugas pembinaan kepondokan terabaikan. Peran-peran pembinaan sebagai

tugas guru pesantren mengalami pergeseran menjadi sebagai tenaga pengajar atau “guru biasa”. Sedangkan bagi Pesantren Modern Muhammadiyah Kuala Madu sertifikasi belum dipandang masalah karena beban mengajar terpenuhi akan tetapi secara hakiki tetap menjadi problem yang harus dituntaskan karena sangat terkait dengan pembinaan di pesantren. Data menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan santri di pesantren ini tergolong lemah karena dari 86 jumlah tenaga pendidik dan kependidikan hanya 12 orang yang tinggal di pondok sebagai *musyrif*. Angka ini tidak berbanding dengan jumlah santri yang akan diawasi dan dibimbing dengan jumlah *musyrif* yang hanya 10.32 %. Itupun belum memiliki kelayakan sebagai pendidik karena belum sarjana.

Kedua, adalah faktor struktur organisasi dan model kepemimpinan di pesantren. Muhammadiyah termasuk amal usahanya seperti pesantren menggunakan model kepemimpinan kolektif kolegial yang menjadi tradisi dan sistem yang baku. Persoalannya adalah implementasi antara yang ideal dan yang nyata, antara kepentingan individu dan kolektif, antara aktor dan sistem. Meminjam teori kepemimpinan yang berlaku di Muhammadiyah ada tiga unsur yang menggerakkan organisasi termasuk organisasi sekolah yaitu: aktor (pelaku), budaya (kultur), dan struktur organisasi. Dalam konteks kepemimpinan di pondok pesantren KHA. Dahlan kepemimpinan kolektif kolegial itu mengedepankan yang mana, apakah aktor, budaya, atau struktur. Berdasarkan fakta di Muhammadiyah memadukan ketiga unsur tersebut dalam menggerakkan organisasi bukan hal yang mudah. Namun di sinilah dinamika dalam kepemimpinan kolektif kolegial yang memerlukan kecerdasan, keahlian, pengalaman, dan kearifan setiap pelaku persyarikatan.¹

Kurangnya kecerdasan dan kearifan dalam meletakkan kepemimpinan kolektif kolegial akhirnya melahirkan fenomena disharmoni sebagaimana yang dialami Pondok Pesantren KHA Dahlan Sipirok. Secara normatif, disharmoni atau konflik di Pondok pesantren dapat diuraikan secara runtut yakni bermula dari konflik afiliasi dan atau kepentingan tertentu pada individu kemudian menjalar kepada konflik persyarikatan. Kepentingan individu mempengaruhi kebijakan organisasi yang ternyata bermasalah. Kelihatan demi kepentingan organisasi tetapi ternyata secara laten menyimpan kepentingan pribadi/kelompok yang kemudian memicu konflik. Konflik terkadang dipicu masalah sederhana, semakin berat, tetapi karena banyak kaitannya sehingga menjadi rumit dan sulit diselesaikan. Tidak berfungsinya kepemimpinan

¹ PP. Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2012* (Bandung: PP. Muhammadiyah, 2012), h. 5.

kolektif kolegial akan mempengaruhi terhadap pengambilan kebijakan yang pada akhirnya berakibat langsung terhadap kenyamanan, kondusifitas, dan iklim pesantren.

Dilihat dari sisi perkembangan kelembagaan dua pesantren Muhammadiyah ini berbeda dengan perkembangan pesantren-pesantren Muhammadiyah di Yogya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Kalimantan. Sebagai proyek bersama di internal Muhammadiyah sejatinya Pondok pesantren ini dikelola secara bersama dan tidak cukup ditangani oleh Direktur sendiri, dan Pimpinan Daerah sendiri. Kenyataan menunjukkan sejak periode awal pendirian pesantren ini hampir tidak ditemukan data yang bersifat substansial dan konkrit sebagai hasil Musyawarah baik pada tingkat Wilayah maupun tingkat Daerah terkait dengan proyek pembinaan yang bersifat berkelanjutan terhadap lembaga perkaderan ulama ini. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2017, program kegiatan pimpinan Wilayah Muhammadiyah terkait dengan pondok adalah kegiatan yang bersifat serimonial seperti acara pelepasan alumni, sosialisasi rakornas, dan tabligh akbar yang kebetulan dilaksanakan di pesantren. Tanfidz keputusan Musyawarah Wilayah (Musywil) tentang Program PWM dari periode ke periode berikutnya tentang pondok pesantren “hanya sekedar program kerja” yang tidak terimplementasikan secara konkrit di lapangan. Justru yang ditemukan adalah konsep yang berbeda sebagaimana Tanfidz Keputusan PWM 2000-2005 yaitu “ingin mengembangkan pendidikan Madrasah sebagai proses pembentukan kader ulama di masa depan”.² Selanjutnya adalah Rancangan Program 2010-2015 yang menurut hemat penulis bertentangan dengan realitas pesantren yang ada yaitu “mengupayakan satu pesantren sebagai pilot proyek pengembangan yang dikelola oleh PWM”.³ Akan tetapi redaksi pada rancangan ini diganti dengan redaksi Tanfidz Keputusan Musywil ke-11, tanggal 09 Januari 2011 sebagai berikut: ”meskipun terdapat gejala penurunan kualitas dan kuantitas secara umum, namun pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah saat ini justru semakin diperlukan. Karena itu, PWM diharapkan meningkatkan upaya pembinaan, termasuk dengan pilihan kemungkinan menjadikan Pondok Pesantren tertentu menjadi pilot proyek”.⁴ Namun sayangnya tanfidz keputusan ini tidak pernah ditindaklanjuti secara aplikatif di dua pondok pesantren ini.

Gambaran di atas tentu sangat terkait dengan semangat dan perhatian terhadap persoalan kaderisasi dan regenerasi. Problema kaderisasi adalah angkatan muda sekarang yang pada saatnya menggantikan generasi pendahulunya ada kecenderungan kurang memiliki penguasaan dan pemahaman Agama Islam yang integral dan komprehensif. Karena

² PWM SU, Tanfidz Keputusan PWM Tanggal 10 Januari 2001.

³ Rancangan Program PWM SU Tahun 2010-2015, 09 Januari 2011.

⁴ PWM-SU, Tanfidz Keputusan Musywil ke 11 PWM SU Thun 2011.

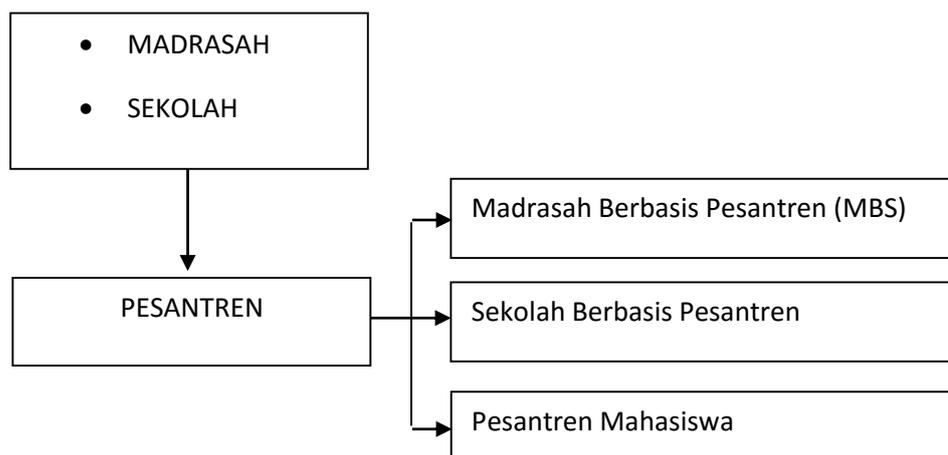
pengetahuan agama Islam diperoleh secara mandiri yang bersifat parsial, lewat pengajian, baitul arqam/darul arqam bukan melalui pendidikan Pondok Pesantren. Kondisi ini dapat dibuktikan pada tingkat Ranting, Cabang, atau wilayah yang semakin sulit mencari kader ulama, kader pimpinan persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki penguasaan dan pemahaman Islam mumpuni.

Demikian pun dilihat dari kacamata kecenderungan spesifikasi bahwa dua pesantren ini masing-masing memiliki kecenderungan perkembangan. Dalam konteks Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu Langkat binjai, kecenderungan perkembangan pesantren mengarah pada *Trensains* sebagaimana ditemukan di beberapa pesantren Muhammadiyah seperti Sragen dan Jombang karena sejak awal hanya mengasuh jurusan eksak. Sementara Pondok Pesantren KHA. Dahlan Sapirook hampir tidak menampakkan kecenderungan. Secara historis pada awalnya pesantren ini memiliki kecenderungan kepada pengkaderan keulamaan yang disebut dengan “ulama mandiri”. Sedangkan pada periode 1980-1995 menampakkan kecenderungan kepada “*Vocational Pesantren*” atau SMK Pesantren yang diharapkan akan melahirkan tenaga-tenaga ahli yang memiliki keterampilan/skill menjadi penggerak pembangunan plus memiliki semangat keagamaan yang kuat.

Tentunya penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dipandang relevan sebagai panduan menganalisis sistem dan orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Dua teori sosial yang digunakan yaitu teori sistem dan teori LIGA milik Talcott Parson. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teori implementasi yang banyak digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kebijakan publik. Sedangkan yang terakhir adalah penggunaan aliran filsafat pendidikan. Temuan penelitian ini sesungguhnya menguatkan teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Tidak berfungsinya sistem yang saling terkait dan tidak terpenuhinya prasyarat yang dibutuhkan maka kelestarian dua pesantren ini akan sulit dipertahankan. Fakta telah membuktikan bahwa tiga lembaga pendidikan kader ulama Muhammadiyah di Sumatera Utara meskipun satu di antaranya tidak dinamakan pesantren telah bubar dan beralih status menjadi sekolah regular. Ketiga lembaga pendidikan tersebut yaitu Pesantren Darul Arqam Kerasaan di Kabupaten Simalungun, Muallimin Muhammadiyah Tamiang di Mandailing Natal, dan Pesantren Diniyah Putri di Kotamadya Medan. Pondok Pesantren KHA. Dahlan tadinya adalah pesantren besar, berwibawah dan populer sampai ke berbagai daerah, tiba-tiba menurun bahkan mundur sama sekali. Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat/Binjai, kini mengalami perkembangan tetapi pada saatnya dapat mengalami hal yang sama.

Pondok Pesantren Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan strategis bagi persyarikatan Muhammadiyah, hal ini sesuai dengan sifat Muhammadiyah sebagai gerakan agama. Tanpa lembaga pendidikan pesantren yang akan melahirkan bibit-bibit ulama maka gerakan Muhammadiyah ke depan akan mengalami anomali gerakan. Pondok pesantren Muhammadiyah di Sumatera utara secara historis lahir dari kehendak dan kesadaran di lingkungan Muhammadiyah sebagai respon terhadap kelangkaan ulama, Muballigh, dan da'i. Secara formal pesantren ini merupakan perwujudan dari berbagai hasil keputusan Muhammadiyah mulai dari tingkat pusat, wilayah yang diaplikasikan di tingkat Daerah. Akan tetapi sampai hari *trend* dua pesantren ini belum menggambarkan idealita sehingga hasil dicapai belum optimal.

Gambar 4. Alur Pertumbuhan dan Pola Pesantren Muhammadiyah



Gambar 5. Alur Pertumbuhan dan Pola Pesantren Non Muhammadiyah

